



ANALYSIS OF REGIONAL AUTHORITY IN THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS BASED ON PANCASILA IDEOLOGY

ANALISIS KEWENANGAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERLANDASKAN IDEOLOGI PANCASILA

Rengga Kusuma Putra^{1*}, Geofani Milthree Saragih²

*** Universitas Sains dan Teknologi Komputer**

***Jalan Majapahit Nomor 605, Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192**

***renggakusumaputra@gmail.com**

Volume 3, Number 1, March 2025

Received: January 30, 2025 Accepted: January 30, 2025 Online Published: March 27, 2025.

ABSTRACT

This research analyses the local authority in the formation of local regulations (Perda) based on the ideology of Pancasila. As a country with a decentralised system, Indonesia gives authority to local governments to form local regulations according to the needs of each region. However, in its implementation, this authority must remain in line with the principles contained in Pancasila as the basis of the state. This research uses normative legal research method with statute approach and conceptual approach. The data source used is secondary data consisting of laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. The results show that in the formation of local regulations, local governments must pay attention to the principles of the formation of good laws and regulations as stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. In addition, there is a supervisory mechanism from the central government and the Supreme Court to ensure that the Perda formed does not conflict with higher regulations and the values of Pancasila. This research recommends strengthening the synergy between local and central government in drafting local regulations, as well as increasing public participation to ensure that any local regulations formed truly reflect the values of Pancasila and the interests of the community at large.

Keywords : Regional Authority; Regional Regulation; Pancasila

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kewenangan daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang berlandaskan ideologi Pancasila. Sebagai negara dengan sistem desentralisasi, Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Perda sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan ini harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan Perda, pemerintah daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, terdapat mekanisme pengawasan dari pemerintah pusat dan Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa Perda yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penyusunan Perda, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna memastikan bahwa setiap Perda yang dibentuk benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat secara luas.

Kata Kunci : Kewenangan Daerah; Peraturan Daerah; Pancasila.